RUU ANTITERORISME KOMPAS - 24/05/18.

Andai Keseriusan Lahir Lebih Awal...



etengah jam menjelang dimulainya rapat membahas Rancangan Undang-Undang Antiterorisme, Rabu (23/5/2018), di Kompleks Parlemen, Jakarta, perwakilan dari pemerintah sudah lengkap hadir di ruang rapat. Namun, baru beberapa anggota Panitia Kerja atau Panja RUU Antiterorisme DPR yang terlihat.

Mendekati jadwal dimulainya rapat pukul 10.00, baru terlihat lebih banyak anggota Panja DPR sehingga sudah memenuhi syarat kuorum rapat. Namun, rapat belum juga dimulai meski waktu terus berjalan hingga jam menunjukkan pukul 10.20. "Kok, belum mulai-mulai?" tanya anggota Panja RUU Antiterorisme dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani.

Ternyata, rapat harus menanti Ketua Panja RUU Antiterorisme dari Fraksi Partai Nasdem, Supiadin Aries Saputra. Akhirnya, rapat baru dimulai pukul 10.31 setelah Supiadin tiba.

Suasana awal rapat tersebut seperti mengulang lagu lama yang biasa terjadi setiap membahas RUU Antiterorisme. Anggota panja kerap tak pernah hadir tepat waktu sehingga harus menunggu untuk bisa kuorum. Bahkan, beberapa kali rapat harus dibatalkan karena tidak kuorum.

Kemudian, kalaupun rapat digelar, sering kali tak banyak anggota panja mengikutinya. Atau jika mengikuti, tiba-tiba menghilang saat rapat masih berlangsung. Perwakilan dari pemerintah yang selalu datang tepat waktu harus pasrah mengikuti kondisi di DPR itu.

Meski perwakilan pemerintah selalu hadir tepat waktu, bukan berarti mereka tak berkontribusi atas lambannya pengesahan RUU Antiterorisme yang drafnya sudah dikirimkan pemerintah ke DPR pada Februari 2016.

Instansi-instansi di pemerintahan kerap kali berbeda pandangan atas sejumlah isu di RUU itu. Pemerintah pun berulang kali meminta rapat ditunda karena sulitnya mencapai titik temu.

Saat rapat RUU Antiterorisme kemarin, perbedaan ini kembali muncul. Saat itu, Anggota Tim Ahli Pemerintah Muladi sempat beda pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih mengenai definisi terorisme.

Kemajuan

Di tengah sejumlah catatan yang muncul, ada sejumlah kemajuan dalam rapat kemarin jika dibandingkan dengan rapat sebelumnya.

Ketika kemarin rapat dimulai, hampir seluruh anggota panja hadir. Mereka pun serius mengikuti rapat, berargumen, dan berdebat hingga rapat usai pukul 15.30. Bahkan, malam harinya, panja bersama pemerintah kembali melanjutkan rapat.

Dari sisi pemerintah, sekalipun sempat muncul perbedaan pendapat antara Muladi dan Enny, masalah itu bisa segera diselesaikan di antara mereka.

Pada saat yang sama, meski masih ada perbedaan pandangan terhadap definisi dari terorisme di antara sejumlah fraksi di Panja, pemerintah dan DPR berkomitmen membawa RUU itu dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama, Kamis ini. Hasilnya kemudian direncanakan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan tingkat kedua atau persetujuan pengesahan RÜU Antiterorisme menjadi UU, Jumat esok hari.

Jadwal tersebut jauh lebih cepat daripada agenda awal yang disusun Pansus RUU Antiterorisme, yaitu rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat kedua, dijadwalkan 31 Mei 2018.

Seandainya keseriusan pemerintah dan DPR ini datang lebih awal, saat ini RUU Antiterorisme mungkin sudah jadi UU. Bisa jadi juga, aksi terorisme belakangan ini bisa diantisipasi lebih awal. Pasalnya, ada sejumlah materi di RUU Antiterorisme yang membuat aparat penegak hukum mempunyai kekuatan lebih mencegah terjadinya aksi terorisme.

Terlepas dari sejumlah pengandaian itu, semoga kali ini RUU Antiterorisme benar-benar segera disahkan menjadi UU. Korban aksi terorisme sudah terlalu banyak. (AGE/APA)